

# STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL DENGAN MEMINIMALISIR IMPOR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Lathif Hakim<sup>1</sup>; Indra Ade irawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, Indonesia,  
email: [lathif.hakim@mercubuana.ac.id](mailto:lathif.hakim@mercubuana.ac.id)

<sup>2</sup>FE, Universitas Mercu Buana, Indonesia,  
email: [Indraadeirawan@gmail.com](mailto:Indraadeirawan@gmail.com)

**Abstraksi,** Dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan strategi-strategi khusus untuk mewujudkannya. Agar perjalanan aktifitas pembangunan kemandirian pangan nasional dapat dilakukan secara sustainable membutuhkan strategi-strategi yang mampu meningkatkan tingkat kemandirian pangan menjadi kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan mencakup empat dimensi, yakni; 1)- Proses produksi pangan disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumberdaya lokal. 2)- Kegiatan budidaya atau produksi pangan dilakukan dengan cara berwawasan ekologis. 3)- Peran petani produsen pangan perlu diapresiasi dengan cara meningkatkan kesejahteraannya. 4)- Lebih mengutamakan keberlanjutannya (sustainable) proses produksi pangan, yang hanya dapat diwujudkan jika dimensi teknis-agronomis, ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap upaya mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menulis instrument-instrument penyokong terwujudnya pembangunan kemandirian pangan nasional yang terdiri dari: konsepsi kemandirian pangan, sistem konstitusi pangan secara filosofis, regulasi-regulasi kebijakan pangan, analisis data pangan dan solusi strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

**Kata kunci:** *Strategi, kemandirian pangan nasional, konstitusi, regulasi, solusi strategi*

## PENDAHULUAN

### A- Latar Belakang:

Dalam upaya untuk membangun ekonomi Indonesia yang maju dan sejahtera, harus menghindari terjadinya kekeliruan kebijakan yang berdampak pada ketergantungan dan *sacarcity* pangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak menjadikan ekonomi Indonesia menjadi kokoh. Ada dua unsur yang menjadikan pembangunan ekonomi kita menjadi kuat, yaitu; kemandirian dan keadilan.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu; hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Lebih dari tujuh puluh empat tahun yang lalu Bung Hatta telah menunjukkan kepada kita makna dasar dari kemandirian: "... tak ada bangsa yang terhormat di atas dunia yang menyerahkan nasibnya sama sekali kepada bangsa lain...". Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha

untuk mengisi kemerdekaan, haruslah dalam upaya untuk membangun kemandirian.

Kemandirian tidak diartikan sebagai pengisolasian diri dari kerjasama dengan negara lain, tetapi kemandirian diartikan sebagai mengoptimalkan kemampuan domestik dan tetap melakukan kerjasama dengan negara-negara lain berdasarkan kerjasama yang adil. Pada tahun 1960-an kemandirian diartikan dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar dari pada konsep proaktif. Sistem ekonomi tersebut ternyata berdampak pada malapetaka perekonomian bangsa kita dan menjadi salah satu faktor perubahan rezim tahun 1998.

Maka kemandirian pangan dapat diartikan dengan swasembada pangan, dimana negara dan bangsa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan domestik bahkan memiliki surplus pangan sehingga mampu mengekspor bahan pangan domestic untuk menambah devisa dan pendapatan

negara dengan terwujudnya swasembada pangan nasional.

Pangan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi baik secara individu dan nasional, karena kebutuhan pangan juga bagian dari kebijakan strategis yang harus diberikan solusi secara cepat dan tepat. Terciptanya keamanan pangan merupakan syarat strategis bagi suksesnya proses pengembangan ekonomi dan social yang bersandarkan pada strategi bervisi ke dalam (endogenous strategy). Oleh karena itu, posisi sektor pertanian menjadi sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan ibu dari seluruh sektor. Dengan demikian, membangun pertanian adalah “keniscayaan” dan membangun pertanian “wajib hukumnya”, apabila pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan

berhasil, maka sebagian besar persoalan bangsa dan negara dapat terselesaikan.

Dalam siklus penyediaan swasembada pangan nasional ternyata daya tahan pangan nasional masih sangat rapuh dan bahkan terancam kelangkaan pangan. Karena kekuatan supply pangan kita masih sangat *deficit* jika dibandingkan dengan supply produksi pangan nasional yang disediakan. Kita lihat data produksi dan konsumsi utama pangan nasional kita ternyata semua lini sector pangan mengalami *deficit*; yang artinya: kemampuan produksi pangan domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan nasional kita. Sehingga harus melakukan import untuk menutup konsumsi domestik pangan nasional, baik pada komoditas padi, jagung, kedelai, minyak CPO, gula, daging sapi, cabe merah dan bawang putih. Lihat data sebagai berikut:

Tabel (1): Produksi Pangan Nasional:

No.	KOMODITAS	2015	2016	2017	2018	2019
1-	Padi	72.32 juta ton	74.33 juta Ton	76.57 juta Ton	78.94 juta Ton	81.19 juta ton
2-	Jagung	19.545 juta ton	20.026 juta ton	20.734 juta Ton	21.458 juta Ton	22.163 juta ton
3-	Kedelai	590 ribu ton	576 ribu ton	561 ribu ton	546 ribu ton	531 ribu ton
4-	Minyak CPO	29.596 ribu ton	31.350 ribu ton	33.629 ribu Ton	36.216 ribu Ton	39.002 ribu ton
4-	Gula	2.73 juta ton	2.57 juta ton	2.75 juta ton	2.90 juta ton	3.8 juta ton
5-	Daging Sapi	452.7 ribu ton	555.2 ribu ton	584.8 ribu Ton	655.88. ribu Ton	755.1 ribu ton
6-	Cabe Merah	1,287,524 ton	1,439,267 ton	1,608,893 Ton	1,798,510 Ton	2,010,475 ton
7-	Bawang Putih	18.921 ton	21.524 ton	24.484 ton	27.852 ton	31.683. ton

**Sumber:** Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, BPS 2015-2019 (diolah).

Tabel (2): Konsumsi Pangan Nasional

No.	KOMODITAS	2015	2016	2017	2018	2019
1-	Padi	73.82 Juta ton	75.75 juta ton	77.96 juta Ton	80.23 juta Ton	82.47 juta ton
2-	Jagung	26.321 juta ton	26.823 juta ton	27.887 juta Ton	28.864 juta ton	29.899 juta ton
3-	Kedelai	2.551 juta ton	2.600 juta ton	2.648 juta Ton	2.697 juta ton	2.746 juta ton
4-	Minyak CPO	25.721 ribu ton	27.385 ribu ton	29.601 ribu Ton	32.045 ribu ton	34.699 ribu ton
4-	Gula	2.84 juta ton	2.89 juta ton	2.98 juta ton	2.68 juta ton	3.89 juta ton
5-	Daging Sapi	458.9 ribu ton	556.9 ribu ton	598.7 ribu Ton	678.8 ribu ton	765.1 ribu ton
6-	Cabe	681.321 ribu	699.976 ribu	719.575 ribu	740.184 ribu	761.872 ribu

		Ton	ton	Ton	ton	ton
7-	Bawang Putih	483,415 ribu Ton	499,134 ribu ton	515,859 ribu Ton	533,665 ribu ton	552,639 ribu ton

*Sumber:* Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, BPS 2015-2019 (diolah).

Dalam tataran global, perdagangan kebutuhan pangan merupakan perdagangan yang terbesar secara nilainya yang disusul dengan perdagangan senjata dan narkoba serta obat-obat terlarang. Dalam dunia Arab sangat bergantung kepada luar negeri dalam mendapatkan setengah kebutuhan pangannya. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak mungkin diterima keberlangsungannya dalam sebuah pasar perberasan dunia yang berubah secara cepat dan juga dalam sebuah kejadian dunia yang disebut dengan krisis pangan dunia. Khususnya yang berhubungan dengan hegemoni negara-negara pengekspor pangan dunia, yang mana ketersediaan pangan dijadikan sebagai senjata politik untuk menjamin tercapainya kepentingan mereka. Maka dalam era globalisasi disebut dengan perang pangan (*Food War*), dimana setiap negara termasuk negara-negara industri maju berupaya keras untuk mengontrol pangan dunia. Karena siapa menguasai pangan maka dialah yang menguasai dunia.

Pada hakekatnya pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Semua warga negara berhak mendapatkan makanan (cukup, bermutu, murah dan terjangkau), sehingga negara wajib menyediakan bahan makanan bagi rakyatnya. Itu berarti bahwa pertanian pangan bukan hanya sebatas mata pencaharian, kesempatan kerja, pendapatan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik saja, melainkan juga menyangkut martabat bangsa. Oleh karena itu, membangun pertanian berarti membangun karakter

bangsa dan membangun martabat bangsa, karena pangan merupakan kebutuhan dasar, persyaratan mutlak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan. Maka Indonesia harus membangun sistem pangannya pada ranah swasembada pangan dan pada peringkat selanjutnya ditingkatkan pada peringkat kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan mencakup empat dimensi, yakni; 1)-Proses produksi pangan disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumberdaya lokal. 2)-Kegiatan budidaya atau produksi pangan dilakukan dengan cara berwawasan ekologis. 3)-Peran petani produsen pangan perlu diapresiasi dengan cara meningkatkan kesejahteraannya. 4)-Lebih mengutamakan keberlanjutannya (*sustainable*) proses produksi pangan, yang hanya dapat diwujudkan jika dimensi teknis-agronomis, ekologis/lingkungan, dan sosial-ekonomis dipadu secara harmonis dalam setiap upaya mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

## **B- Rumusan Permasalahan Penelitian:**

Permasalahan mendasar yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah: 1- Pada bidang pangan apakah negara kita sudah bisa dikatakan mandiri?. 2- Benarkah lahan pertanian kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik?. 3-Kenapa kita harus melakukan impor pangan padahal kita sudah termasuk negara swasembada pangan?. 4-Benarkah rakyat Indonesia sudah sejahtera bila dilihat dari sisi kemandirian pangan?. 5-Strategi-strategi apa saja yang harus digulirkan untuk membangun kedaulatan pangan sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat?.

## **C- Kajian Teori dan Daftar Pustaka:**

### **1-Konsep Kemandirian Pangan:**

Konsep kemandirian (*self reliance*) merupakan istilah yang bersinonim dengan

berdikari diatas kaki sendiri (baca arab: *al-i'timadz alad dzat*). Maka perekonomian nasional harus berbasis pada dua konsepsi dasar, yaitu: keadilan dan kemandirian. Tanpa terwujudnya dua konsepsi ini mustahil terwujud kesejahteraan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara signifikan. Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tujuh puluh tahun yang lalu Bung Hatta telah menunjukkan kepada kita makna dasar dari kemandirian: "... tak ada bangsa yang terhormat di atas dunia yang menyerahkan nasibnya sama sekali kepada bangsa lain...". (Deliar Noer, 1990). Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah sebagai upaya untuk membangun kemandirian.

Konsep kemandirian tidak bermakna keterisolasian. Konsep kemandirian tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan (*dependency theory*) yang banyak dibicarakan di Amerika Latin pada tahun 50-60 an, atau dipraktekkan di kawasan Asia seperti di Myanmar sampai saat ini. Yang terbentuk dengan sistem serupa adalah; masyarakat tertindas yang terkekang peradabannya. Pada tahun 1960-an, di Indonesia cita-cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Hal itu diartikan dengan melakukan mempertahankan diri (defensif) menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif, maka imbasnya konsep tersebut menjadi malapetaka pada perekonomian bangsa kita.

Dengan demikian, maka kemandirian ekonomi mencakup independensi dalam pembuatan keputusan ekonomi dan juga dalam dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju, karena kemandirian bukan berarti berbagi kemiskinan. Suatu bangsa dikatakan maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan penduduknya serta merata pendistribusiannya. Kalau kita masuk dalam kemandirian pangan berarti: bagaimana kita mampu mengelola pangan kita baik dari pengelolaan, pendistribusian dan pemasaran dan mampu menghidupi konsumsi pangan nasional secara natural tanpa harus melakukan impor.

Dalam Islam juga menganjurkan kepada manusia agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan konsep kemandirian pangan sebagaimana Allah, swt. Berfirman dalam QS. Al-Imran; 139: "*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman*". (QS. 3: 139). Demikian juga hadis Nabi, saw. yang menjelaskan pentingnya kemandirian yang diriwayatkan dari Miqdad bin Ma'di Yakrib, ra. dari Nabi, saw. bersabda: "Tidak seorangpun memakan makanan itu lebih baik kecuali dari hasil jerih payah tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud, as. telah memakan dari hasil tangannya sendiri". (HR. Bukhari).

Menurut Ir. Soekarno yang dimaksud dengan kemandirian pangan adalah: "Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka menyebabkan

"malapetaka". Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner".

George W. Bush mengatakan: "Suatu negara harus mampu menyediakan pangan yang cukup agar tidak tergantung kepada impor dan tekanan kondisi pangan internasional".

Menurut Penelitian FAO (2002) mengungkapkan, bahwa negara dengan jumlah penduduk diatas 100 juta orang, yang kebutuhan pangannya bergantung pada impor, akan sangat sulit menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Contohnya Uni Soviet yang pernah jadi Negara Adidaya bersama AS pada era 1960 – 1980-an runtuh dan tercerai berai menjadi negara-negara kecil lantaran kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, diperlukan implementasi kebijakan teknis dan politik-ekonomi secara sinergis. Menurut UU No.18/2002, "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu warga negara, yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemandirian pangan adalah; bagaimana suatu bangsa dan negara mampu mengelola pangannya baik secara produksi, konsumsi, distribusi dan pemasarannya dilakukan secara mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik tanpa berimpor atau bergantung kepada negara lain.

## **2- Kemandirian Pangan Dalam Konstitusi Republik Indonesia:**

Menurut Didik Rachbini, konsep perekonomian konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, harus memaknai isi kandung yang ada dalam dua dasar konstitusi tersebut. Perekonomian yang mandiri yang berdasarkan konstitusi adalah konsep sistem ekonomi dengan cara menginterpretasikan isi dan kandungan konstitusi. Substansi utama yang sangat mendasar terdapat pada nilai-nilai sila Pancasila dan UUD 1945. Yaitu; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan atau demokrasi, serta keadilan sosial. Maka dengan memaknai dan membangun sistem yang berbasiskan pada konstitusi Pancasila yang kita terjemahkan dalam kebijakan strategis perundang-undangan secara konsisten maka kebijakan teknis yang kita rasakan di empiris

Dari penjelasan konstitusi pasal 33 UUD 1945 menjelaskan kepada kita bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya; Perekonomian nasional dilakukan berbasis pada kerjasama antar pihak dalam lingkup kekeluargaan. Berkaitan dengan kemandirian pangan, maka konstitusi kita menjelaskan bahwa sistem pengelolaan pangan baik produksi, konsumsi, distribusi dan pemasarannya juga berbasis pada kekeluargaan. Pasar yang dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, menyayangi dan menghargai agar semua elemen bangsa Indonesia terwujud pemenuhan kebutuhan pangan. Maka sistem pangan secara nasional harus berbasiskan pada pengelolaan pangan yang

perekonomian akan terbingkai dengan sistem yang adil dan makmur berbasis pada kemandirian.

Konstitusi ekonomi yang termaktub dalam UUD 1945 adalah dijelaskan dalam pasal 33 baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD NKRI Tahun 1945:

Pasal 33 (asli) berbunyi sebagai berikut:

(1)- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)-Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)-Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan setelah diubah melalui Perubahan Keempat pada tahun 2002, Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru, yaitu: (4)- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5)-Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

mandiri. Artinya; baik pada ayat kedua dan ketiga perekonomian khususnya pangan membutuhkan peran pemerintah untuk mengelolanya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, maka permasalahan pangan tidak boleh diserahkan kepada pasar yang mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang besar untuk menguasai pengelolaan pangan, baik pengelolaannya- dari produksi sampai pemasarannya- hal ini dimaksud untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pasal 33 ayat 4, mengatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini menjelaskan kepada kita dalam manajemen ekonomi berbasis pada demokrasi ekonomi, artinya; ekonomi diperoleh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkaitan dengan pangan berarti; sistem pengelolaan pangan nasional tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, karena hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk pengelolaannya. Yang semua pengelolaan pangan tersebut berdasarkan manajemen modern secara efisien dan harus berkeadilan tidak pilih kasih dan tebang pilih yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan berbasis pada kemandirian pangan. Artinya: negara dengan sekuat tenaganya untuk membangun bangsanya dengan sistem swasembada pangan dan tidak diperbolehkan menggantungkan urusan pangan kepada negara lain.

harus berbasis pada demokrasi pangan nasional. Artinya; pangan yang diperoleh dari rakyat, digunakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip kebersamaan yang berarti; semua warga negara Indonesia harus terpenuhi semua kebutuhan pangannya, tidak boleh satu individu dari warga negara yang

### **3-Peran Sektor Pertanian Dalam Membangun Kedaulatan Pangan Nasional:**

Bidang pertanian merupakan sektor terpenting dalam perekonomian nasional kita, terlebih bahwa negara kita adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya berusaha dalam pengelolaan pertanian. Dalam sirkulasi perekonomian nasional sektor pertanian berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp. 1.307.025.70 Trilyun menurut harga konstan dan Rp. 1.900.348.50 menurut arga berlaku, menempati peringkat kedua setelah bidang Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.193.266.40 menurut harga konstan dan sebesar Rp. 2.947.299.20 menurut harga yang berlaku dalam lapangan usaha.

**TABEL (3): PDB DENGAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.129.052.70.	1.171.445.80	1.210.955.50	1.257.875.50	1.307.025.70
2.	Pertambangan dan Penggalian	794.489.50	767.327.20	774.593.10	779.678.40	796.505.00
3.	Industri Pengolahan	1.854.256.70	1.934.533.20	2.016.876.90	2.103.466.10	2.193.266.40
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	94.047.20	94.894.80	100.009.90	101.551.30	107.108.60
5.	Konstruksi	826.615.60	879.163.90	925.040.30	987.924.90	1.048.082.80
6.	Transportasi dan Pergudangan	326.933.00	348.855.90	374.843.40	406.679.40	435.185.30
7.	Informasi dan Komunikasi	384.475.60	421.769.80	459.208.10	503.420.80	538.874.60
8.	Jasa Keuangan dan Asuransi	319.825.50	347.269.00	378.279.40	398.959.30	415.579.10
9.	Real, Estate	256.440.20	266.979.60	279.500.50	289.730.40	300.106.70
10.11.	Jasa Perusahaan	137.795.30	148.395.50	159.321.70	172.763.80	187.691.10
12.	Jasa Pendidikan	263.685.00	283.020.10	293.887.60	304.762.10	321.083.60
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.357.10	97.465.80	102.490.20	109.504.10	117.314.90
14.	Jasa Lainnya:	134.070.10	144.904.20	156.507.50	170.177.30	185.468.90
	<b>PDB</b>	8.564.866.60	8.982.517.10	9.434.613.40	9.912.703.60	10.425.316.30

Sumber: BPS 2019 (diolah)

**TABEL (4): PDB DENGAN HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.409.655.70	1.555.207.00	1.671.597.80	1.787.285.20	1.900.348.50
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.039.423.00	881.694.10	890.868.30	1.029.554.60	1.198.987.10
3.	Industri Pengolahan	2.227.584.00	2.418.891.70	2.545.203.60	2.739.711.90	2.947.299.20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	114.905.10	129.833.70	142.344.40	162.339.90	176.346.10
5.	Konstruksi	1.041.949.50	1.177.084.10	1.287.600.80	1.410.513.60	1.562.297.00
6.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.419.239.40	1.532.876.70	1.635.410.40	1.768.896.10	1.931.911.30

6.	Transportasi dan Pergudangan	466.968.90	578464.30	644.993.90	735.229.60	797.281.10
7.	Informasi dan Komunikasi	369.457.30	406.016.50	449.188.70	513.715.80	559.054.60
8.	Jasa Keuangan dan Asuransi	408.438.80	464.399.90	520.206.80	571.185.90	616.252.80
9.	Real, Estate	294.573.40	327.601.40	350.488.20	382.474.10	406.635.50
10.11.	Jasa Perusahaan	165.990.60	190.267.90	211.623.60	238.217.00	267.094.00
12.	Jasa Pendidikan	341.818.40	387.611.40	417.344.80	446.254.50	482.134.10
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.147.20	123.191.50	132.100.50	144.621.90	157.923.00
14.	Jasa Lainnya:	163.548.80	190.581.00	211.427.90	239.259.00	268.632.70
	<b>PDB</b>	<b>10.569.705.30</b>	<b>11.526.332.80</b>	<b>12.401.728.50</b>	<b>13.587.212.60</b>	<b>14.837.357.50</b>

**Sumber:** BPS 2019 (diolah)

Dengan demikian, bidang pertanian memiliki posisi yang strategis dalam sistem tata perekonomian nasional sehingga harus menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan untuk menata perekonomian nasional menjadi lebih berkemajuan sehingga terwujud Indonesia yang adil dan makmur. Karena pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian nasional yang menjadi penghasil pangan dengan perannya yang signifikan dalam struktur perekonomian nasional, maka secara umum peran sektor pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a- Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan matapencaharian bersumber dari pertanian.
- b- Sektor pertanian menciptakan lapangan kerja terbesar yang sekaligus ikut dalam proses pengentaskan kemiskinan.
- c- Sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian mempunyai fungsi strategis untuk menjamin ketahanan pangan nasional bagi semua penduduk.
- d- Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan pasar

potensial bagi produk dan jasa sektor non-pertanian.

- e- Dengan adanya gizi yang cukup akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa sejajar dengan bangsa lainnya di dunia global.
- f- Komoditas pertanian non-pangan khususnya komoditas perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk devisa negara.
- g- Kemajuan dalam bidang pertanian akan mampu menjadi motor penggerak kemajuan dalam perekonomian nasional.
- h- Ketersediaan produksi pangan dalam negeri yang cukup akan mampu meminimalisir gejolak sosial dan politik sehingga terwujud stabilitas nasional.

Dari sebagian peran sektor pertanian yang telah saya jelaskan ini akan menjadi pemicu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemajuan pembangunan pertanian, demi terwujudnya perekonomian yang stabil Indonesia yang adil dan makmur.

#### **4- Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Dengan Meminimalisir Impor:**

Untuk membangun bangsa dan negara yang maju, adil dan makmur, maka perdagangan harus mengandalkan pada sumberdaya nasional untuk memenuhi kebutuhan perekonomian domestik. Dalam hal ini, strategi kebijakan yang harus dilakukan adalah memaksimalkan perdagangan ekspor dan meminimalisir impor. Agar bangsa dan negara kita mengalami penguatan ekonomi yang ditandai dengan surplus pangan dalam frame swasembada pangan. Jika perekonomian nasional melemah yang ditandai dengan neraca perdangan mengalami defisit, hal ini berpengaruh pada *balance of payment* dan melemahnya nilai rupiah yang berdampak pada melemahnya perekonomian nasional.

jika kita melihat data yang termaktub dalam lalulintas perdagangan ekspor dan impor Indonesia khususnya dalam bidang komoditas pertanian, yaitu; padi, jagung, kedelai, minyak CPO, gula, daging sapi, cabe merah dan bawang putih, dari tahun 2015-

2019 semua komoditas pertanian untuk konsumsi perekonomian semuanya berbasis pada impor, kecuali pada bidang minyak CPO dan Cabe Merah yang mengalami surplus perdagangan.

Kondisi pertanian nasional kita, sangat

menghawatirkan, padahal negara kita adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya lebih dari 49 juta orang yang bekerja dalam bidang pertanian dengan memiliki lahan yang sangat luas di bidang pertanian. Tetapi lahan yang luas tidak dibangun dengan maksimal sehingga hasilnya adalah minus ketahanan pangan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah harus diubah strateginya menjadi kebijakan meminimalisir import. Bagaimanapun caranya sumber daya perekonomian domestik harus dimaksimalkan potensinya sehingga terwujud kedaulatan pangan nasional

**TABEL (5): PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PADA KOMODITAS PERTANIAN**

No.	KOMODITAS	2015	2016	2017	2018	2019
1-	Padi	(-) 1.5 juta ton	(-) 1.42 juta ton	(-) 1.39 juta ton	(-) 1.29 juta ton	(-) 1.28 juta ton
2-	Jagung	(-) 6.776 juta ton	(-) 6.797 juta ton	(-) 7.153 juta ton	(-) 7.406 juta ton	(-) 7.736 juta ton
3-	Kedelai	(-) 1.961 juta ton	(-) 2.024 juta ton	(-) 2.087 juta ton	(-) 2.151 juta ton	(-) 2.215 juta ton
4-	Minyak CPO	(+) 3.875 juta ton	(+) 3.965 juta ton	(+) 4.028 juta ton	(+) 4.171 juta ton	(+) 4.303 juta ton
4-	Gula	(-) 11 ribu ton	(-) 32 ribu ton	(-) 23 ribu ton	(-) 22 ribu ton	(-) 9 ribu ton
5-	Daging Sapi	(-) 59 ribu ton	(-) 17 ribu ton	(-) 139 ribu ton	(-) 230 ribu ton	(-) 69 ribu ton
6-	Cabe Merah	(+) 662 ribu ton	(+) 739.291 ton	(+) 889.318 ton	(+) 1058.326 ton	(+) 1.248.603 ton
7-	Bawang Putih	(-) 464.494 ton	(-) 477.610 ton	(-) 491.375 ton	(-) 505.813 ton	(-) 520.956 ton

**Sumber:** Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, BPS 2015-2019 (*diolah*).

### 5- Strategi-Strategi Dalam Membangun Kedaulatan Pangan Nasional:

Dengan melihat perkembangan data-data produksi dan konsumsi komoditas bahan pangan nasional secara nasional didapati bahwa

produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memasok kebutuhan pangan nasional dalam negeri, sehingga harus melakukan impor. Seperti yang kita pahami dalam tabel data, bahwa semua

komoditas pangan kita selalu mengandalkan impor dari tahun ke tahun. Inilah yang menjadi sebab utama dalam melakukan penelitian ini agar dengan adanya penelitian ini mampu memberikan ide dan konsepsi baru sehingga kita dapat mewujudkan swasembada pangan dengan menggali dari pengelolaan pertanian domestik. Maka strategi-strategi yang digulirkan adalah:

- a- Meningkatkan ketersediaan pangan dan perluasan pengelolaan lahan.
- b- Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian.
- c- Mengembangkan logistik dan perluasan benih/bibit.
- d- Penguatan kelembagaan pertanian.
- e- Penguatan dan peningkatan kualitas SDM Pertanian.
- f- Pengembangan dan Penguatan bioindustri dan bioenergi.
- g- Penguatan jaringan pasar produk pertanian.
- h- Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.
- ii- Pelayanan informasi publik dan perkembangan pasar komoditas pertanian.
- j- Pengelolaan regulasi pertanian.
- k- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pertanian, baik dari pembibitan, pengelolaan, produksi, perawatan, pemupukan, pemasaran dan sistem pelaporan sirkulasi keuangan keuntungan (baca: pain-gain: net profit).

Dengan sebagian strategi-strategi ini yang telah peneliti sampaikan, sehingga *output* yang dihasilkan dari pertanian dapat memaksimalkan potensi pertanian kita, sehingga terwujud kemandirian pangan yang

Sedangkan Metodologi Kualitatif bersumber Primer dengan menggunakan tehnik observasi dan interview pada masyarakat petani yang ada di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai

kita cita-citakan menjadi bangsa dan negara swasembada pangan- Indonesia adil dan makmur.

#### **D- Metodologi Penelitian:**

Metode penelitian Model Kualitatif adalah: Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat interpretatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah: *Pertama*; Merumuskan ide dan gagasan. *Kedua*; Mengumpulkan sarana pendukung penelitian dan hal-hal yang dilakukan dalam penelitian, seperti; laptop, dana pembiayaan penelitian, buku-buku referensi penelitian, data-data penelitian, observasi lapangan dan wawancara. *Ketiga*; Merumuskan Usulan Penelitian. *Keempat*; Menguji Proposal kepada Reviewer. *Kelima*; Memperbaiki Usulan Penelitian. *Keenam*; Menyusun Laporan Penelitian. *Ketujuh*; Menganalisis data dan Membuat kesimpulan terhadap temuan penelitian.

Adapun sumber data penelitian ini bersifat kualitatif skunder yang bersumber dari buku-buku referensi yang menjelaskan tentang kemandirian ekonomi yang membahas di dalamnya kemandirian pangan, aplikasinya dalam sistem perekonomian nasional, baik secara filosofis yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Dan secara strategis yang termaktub dalam sistem-sistem kebijakan-kebijakan perekonomian nasional yang tertulis dalam data-data perkembangan perekonomian nasional yang meliputi; data-data pertanian, produksi, konsumsi, ekspor dan impor bahan pangan selama lima tahun mutakhir dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan Data yang diolah dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan.

bentuk *sample* dari kondisi pertanian di Indonesia. Observasi yang saya lakukan pada hari Senin-Ahad; 1-7 Mei 2019, kepada Bapak, KH. Abdul Basyir, Muarifin, Nisaul Mazidah, Pak Taslim, ibu Jumiatun, Bapak Muntamam, Bapak Tarno, Bapak Rodi, dan

Saudara Mustafid sebagai bentuk sample dan mereka memiliki opini yang sama. Opini yang terbangun dari mereka, adalah:

- 1- Negara tidak hadir pada saat petani mengalami masa panen, sehingga harga hasil pertanian jatuh bahkan terkadang ketika masa pertanian panen, negara menggunakan kebijakan impor. Kebijakan ini sangat mendzalimi para petani.
- 2- Rata-rata mereka menggunakan manajerial pertanian yang berbasis konvensional tradisional, sehingga tidak menggunakan sistem manajerial modern berbasis master plan business.
- 3- Semakin minimnya tenaga pertanian akibat urbanisasi, disisi tertentu dibarengi dengan sistem teknologi yang kurang memadai.
- 4- Masih terdapat berbagai hambatan dalam pertanian, seperti; hama tikus dan wereng yang dalam hal ini pemerintah tidak hadir untuk memberikan solusi yang tepat dalam memberantas hambatan pertanian.
- 5- Cost produksi yang masih sangat mahal dibanding dengan hasil penjualannya; harga pupuk yang sangat mahal bahkan terkadang langka kuantitasnya, obat-obatan yang mahal dan sewa teknologi untuk pengelolaan dan teknologi pemanen hasil pertanian yang mahal.
- 9- Seharusnya pemerintah tidak melakukan kebijakan pengumuman impor dalam satu pintu. Artinya; pemerintah melakukan impor pada saat kondisi pertanian yang mengalami masa paceklik. Sebab lahan pertanian yang luas secara nasional masa panen dan masa pacekliknya tidak sama, sehingga harus dipetakan pada setiap daerah dengan tepat dan benar, agar kebijakan impor dan ekspor komoditas pangan pertanian tepat sasaran.
- 6- Sistem pemasaran yang masih berbasis pada individu tidak berbasis pada koperasi desa. Sehingga sistem pemasaran pasar produksi yang tradisional sangat dimanfaatkan oleh para tengkulak yang pada akhirnya net profit yang mereka dapatkan sangat minim dibanding dengan cost produksi yang mereka anggarkan.
- 7- Sistem manajemen pertanian tradisional ini yang masyarakat Demak lakukan sehingga mayoritas mereka beropini bahwa untuk melakukan ekspansi pertanian sangat sulit, sehingga tingkat kesejahteraan belum setara dengan masyarakat yang usaha bisnisnya berbasis industri manufaktur dan industri jasa.
- 8- Sistem impor komoditas pertanian dan bahan pangan yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat musim yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah melakukan impor komoditas pertanian di saat pertanian panen dan tidak melakukan impor di saat masa paceklik. Semestinya kebijakan yang benar adalah; pemerintah melakukan kebijakan impor di saat paceklik dan melakukan kebijakan ekspor di saat panen, sehingga harga komoditas pertanian akan terangkat.
- 10- Semestinya, negara harus melakukan ekspor secara prioritas dan meminimalisir impor sebagai kebijakan prioritas pemerintah, agar sistem kedaulatan pangan terwujud untuk mewujudkan swasembada pangan nasional demi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata.

## E- Kesimpulan Dan Saran:

Setelah membahas dan meneliti pada data dan pembahasan mengenai permasalahan pangan nasional dan secara empiris yang kita dapati dari berbagai wawancara kepada masyarakat mengenai ketersediaan pangan dan harga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, kita dapati bahwa:

- 1- Indonesia sebagai negara agraris pemenuhan kebutuhan pangannya masih mengandalkan impor.
  - 2- Pengelolaan lahan pertanian yang tidak maksimal, karena masih banyak jutaan hektar pertanian sebagai lahan potensi untuk melejitkan ketersediaan pangan sehingga terwujud swasembada pangan belum dikelola dengan maksimal.
  - 3- Sistem pembibitan yang tidak unggul sehingga menjadi kendala dalam melipatgandakan hasil pertanian.
  - 4- Harga *cost* produksi yang mahal, termasuk pupuk yang mahal, menjadikan pertanian lebih besar costnya dari profitnya yang menjadikan petani tidak sejahtera.
  - 5- Sarana infrastruktur pertanian yang tidak terintegrasi dengan teknologi tinggi yang dikelola secara apik, meliputi pengairan yang stabil, pengelolaan lahan, pemupukan sampai pada pemasaran.
  - 6- Sistem pemasaran yang tidak berbasis pada kehadiran pemerintah untuk mendongkrak nilai harga hasil produksi pertanian, sehingga para petani selalu dirugikan baik oleh pasar, maupun oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat atau petani.
- 2- Pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan pengelola kebijakan harus benar-benar memperhatikan bidang pangan sebagai prioritas utama dalam pembangunan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat pertanian.
  - 3- Sistem pembibitan harus dibangun dengan satu pintu, agar bibit unggul dalam pertanian menjadi program bersama dalam memajukan pertanian.
  - 4- Pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga komoditas yang dihasilkan pertanian, agar harga tidak dipermainkan oleh para tengkulak, bahkan negara hadir langsung untuk menangani harga hasil pangan pertanian (-yang selama ini terdapat pembiaran pemerintah di masa panen), sehingga harga hasil pertanian dapat dikendalikan pada harga yang adil, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, khususnya kepada masyarakat pertanian.
  - 5- Infrastruktur pertanian harus dibangun dengan teknologi yang tinggi baik dari sisi pengairannya, pengelolaannya, pemanennya sampai pada pemasarannya dibangun berdasarkan teknologi pertanian komersial dan informasi yang memadai.
  - 6- Dalam pengelolaan pertanian harus dimanaj dengan manajemen organisasi modern berbasis korporasi/perusahaan, untuk diketahui *cashflow* pengelolaan pertanian dan pelaporan keuangan berbasis databased. Sehingga bisa dievaluasi sebab naik dan menurunnya net-profit perusahaan pertanian berbasis pada teknologi tinggi.

### Saran:

- 1- Bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang masih *idle asset* agar diberdayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## F- Referensi:

- Abu Syadi, (1992), *“At-Tabaiyah AL-Iqtishadiyah”*, Az-Zahra’ Lil I’lam, Kairo.
- Khursyeid (1980), *“Istratejiyatut Tanmiyah Min Mafhumin Islamiyin”*, Dalam buku *“Al-Islam Wan Nidzam Al-Iqtishady al-Jadid”*, Darus Saras, Tunisia.
- , *“At-Tanmiyah al Iqtishadiyah Fi Itharin Islamiyin”*, terjemah: Dr. Rafiq al-Mashry, *“Majalah Ekonomi Islam, No. 2, Jilid. 2, Kairo.*
- Binnabi, (1978), *“Al-Muslim Fi Alamil Iqtisahd”*, Dar Syuruq, Beirut.
- Al-Baji, (1977), *“At-Tanmiyah; Masyakiluha Wa Muqtadhayatuha Wa Mauqiful Islam Minha”*, Depdinas, Tunisia.
- Bakar, (1999), *“Madkhol Ilat Tanmiyah al-Mutakamilah; Ru’yah Islamiyah”*, Darul Qalam, Damasqus.
- Bank Indonesia (2017), *“Usulan Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah”*.
- Sachbini, D.J. (2017), *“Pemikiran Ekonomi Konstitusi”*, Jurnal Ketatanegaraan MPR RI, Volume: 006/Desember 2017.
- Rachbini, D.J. (2004), *“Ekonomi Politik; Kebijakan dan Strategi pembangunan”*, Granit-Obor, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, (2017), *“Kemandirian dalam Format Ekonomi Baru”*, Lembaga Pengkajian MPR RI, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, Stern, Joseph (2015), *“Reinventing Indonesia”*, World Scientific, Singapore.
- “Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”*, CIDES, Jakarta.
- Hafsah, Mohammad Jafar, (2017), *“Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan”*, Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Uma Skaran, Roger Bougie, (2017), *“Metode Penelitian Untuk Bisnis”*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono, (2016), *“Metode Penelitian Manajemen”*, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia: [www.kementan.go.id](http://www.kementan.go.id)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

